

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup “Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang semua benda, daya, keadaan, makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”. Manusia dan lingkungan hidup memiliki hubungan keterkaitan yang sangat erat, manusia dalam hidupnya akan selalu berinteraksi dengan lingkungan dimana ia berada. Jadi, dapat diartikan bahwa semakin banyak jumlah penduduk maka semakin besar pula dampak yang dihasilkan ke lingkungan hidup (Soemarwoto, 1997)

Indonesia termasuk negara berkembang dengan jumlah penduduk yang relatif banyak sebagai ciri khasnya, hal ini akan berdampak pada lingkungan dimana penduduk tersebut tinggal. Pada tahun 2019, jumlah penduduk Indonesia mencapai 268 juta jiwa, dengan kenaikan 30 juta jiwa penduduk dalam kurun waktu 9 tahun (BPS, 2020b). Lingkungan hidup Indonesia sebagai suatu ekosistem terdiri dari beberapa daerah, yang masing masing sebagai suatu kesatuan yang meliputi beberapa aspek seperti sosial budaya, ekonomi dan fisik dengan corak yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya (Darsono, 1995). Sama seperti negara berkembang pada umumnya, kebijakan yang dilakukan pemerintah adalah guna

meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan cara menaikkan konsumsi dan produksi masyarakat (Chaerani, 2018). Karena aktivitas konsumsi dan produksi yang terus bertambah maka limbah yang dihasilkan juga akan terus bertambah seiring dengan bertambahnya aktivitas produksi dan konsumsi tersebut.

Pengertian sampah atau limbah menurut Pasal I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sedangkan menurut Efendi (2014), limbah termasuk semua materi yang ditetapkan sebagai limbah dan materi apa pun baik cair, padat, gas atau radioaktif yang dibuang, dipancarkan atau disimpan di lingkungan dalam volume, komposisi atau cara yang dapat menyebabkan perubahan lingkungan. Menurut Chaerul et al. (2007) pengelolaan sampah di kota-kota di Indonesia menjadi masalah yang semakin kompleks seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan berdampak pada banyaknya jumlah sampah yang dihasilkan, beberapa penelitian menyebutkan terdapat penyebab masalah yang dihadapi dalam pengelolaan sampah di Indonesia. Tidak hanya faktor jumlah penduduk yang berkontribusi dalam peningkatan volume sampah dan limbah di Indonesia, tetapi ada beberapa faktor lain yang mempengaruhinya seperti pola konsumsi masyarakat yang memberikan kontribusi dalam peningkatan volume sampah dan menghasilkan berbagai jenis sampah termasuk sampah yang sulit diurai dan berbahaya bagi alam sehingga peranan lingkungan menjadi menurun,

penyebab utama hal ini adalah karena sifat atau ciri yang melekat pada lingkungan alami itu sendiri telah menyebabkan manusia mengeksploitasi secara berlebihan sehingga menurunkan fungsi lingkungan itu sendiri (Suparmoko, 2000). Sesungguhnya Allah SWT telah berfirman dalam QS Ar-Rum Ayat 41 yang berbunyi:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي  
عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

*Artinya:*

*“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar)” (QS Ar-Rum (30):41)*

Dalam QS Ar-Rum ayat 41, Allah SWT telah memperingatkan manusia akan akibat yang diperbuat pada lingkungan dan alam semesta. Padahal, Allah SWT menciptakan alam semesta ini untuk manusia dan manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai khalifah (pemimpian) di bumi ini untuk menjaga bumi dan lingkungan, namun manusia kadang yang membuat kerusakan secara sadar ataupun tidak sadar. Sama halnya seperti masalah pengelolaan sampah, jika tidak dikelola dengan baik maka akan terjadi pencemaran lingkungan.

Akibat adanya sampah yang berlebihan maka nantinya akan menimbulkan banyak pencemaran. Pencemaran merupakan fenomena yang bersifat *pervasive* (akan tetap ada) sebagai akibat dari proses aktivitas ekonomi, maka dari sudut prinsip ekonomi sumber daya, jalan yang terbaik

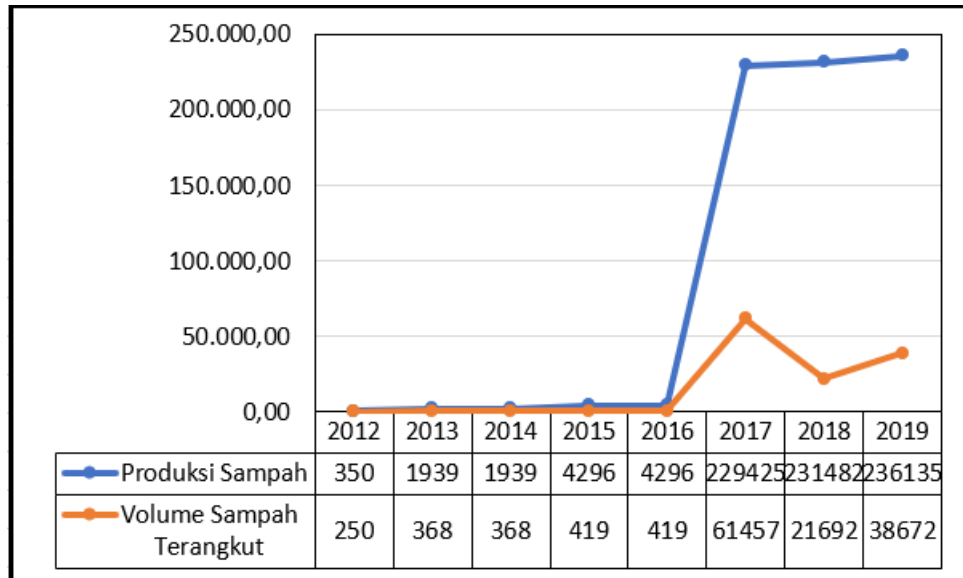
dalam menangani masalah pencemaran adalah bagaimana mengendalikan pencemaran tersebut ke tingkat yang lebih efisien (Fauzi, 2010). Contoh dari pencemaran adalah pencemaran tanah permukaan. Yang dimaksud dengan tanah permukaan adalah tanah permukaan di daerah pemukiman penduduk dimana aktivitas manusia menghasilkan sampah atau buangan padat yang tidak lagi dipergunakan, dimana tanah yang baik seharusnya mengandung unsur unsur yang penting yaitu, nitrogen dan nutrisi lain seperti fosfor dan kalsium (Vogler, 1983). Zat-zat tersebut akan hilang apabila sampah-sampah yang ada tidak ditangani dengan baik dan benar. Sampah juga dapat menyebabkan pencemaran air dimana air adalah salah satu unsur pokok dalam kehidupan manusia yang dipergunakan untuk rumah tangga, industri, rekreasi, transportasi, perikanan, pertanian dan lain sebagainya. Air juga dapat menghantarkan bibit penyakit, terutama infeksi saluran pencernaan (Reksohadiprodjo et al., 1997). Terdapat cara untuk mengetahui kualitas sumber daya air yaitu dengan cara mengamati banyaknya buangan limbah ke badan air dengan cara mengukur besaran oksigen yang diperlukan. Volume oksigen yang diperlukan oleh suatu badan air adalah fungsi dari kondisi lingkungan seperti temperatur, kecepatan aliran serta beban buangan (Suparmoko, 2000). Apabila jumlah penduduk di suatu kota besar sedangkan luas daerahnya relatif kecil, maka sampah yang terkumpul setiap harinya jika tidak segera dikumpulkan, diangkut dan dibuang akan menumpuk dan menggunung. Sebagai akibatnya maka seluruh kota akan menjadi kotor, merusak keindahan kota, menimbulkan

bau kurang sedap dan membahayakan kesehatan masyarakat karena tumpukan sampah tersebut menjadi sarang lalat, tikus, kecoa dan binatang lainnya (Reksohadiprodo et al., 1997)

Kabupaten Magelang merupakan daerah dengan jumlah penduduk cukup tinggi yaitu sebanyak 1.290.591 jiwa, jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan Kota Magelang (BPS, 2019). Kepadatan jumlah penduduk di Kabupaten Magelang dapat dilihat dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Magelang yang menunjukkan bahwa pada delapan tahun terakhir terhitung sejak tahun 2010 hingga 2018 pertumbuhan jumlah penduduk Kabupaten Magelang meningkat rata-rata sebesar 8,27%. Pada tahun 2010 jumlah penduduk Kabupaten Magelang sebesar 1.181.916 jiwa, hingga pada tahun 2018 menjadi 1.279.625 jiwa (BPS, 2018). Naiknya kebutuhan hidup konsumsi masyarakat dari tahun ke tahun di sebabkan karena bertambahnya jumlah anggota dalam rumah tangga atau dengan kata lain dengan bertambahnya jumlah penduduk maka konsumsi masyarakat akan mengalami peningkatan (Pasomba, n.d.). Rata-rata pengeluaran komposisi konsumsi makanan dan non makanan Kabupaten Magelang mengalami peningkatan terhitung sejak tahun 2011 hingga 2019. Pada tahun 2011 pengeluaran makanan dan non makanan Kabupaten Magelang hanya sebesar Rp327.410 dan mengalami peningkatan di setiap tahunnya hingga pada tahun 2016 menjadi Rp887.835.

Banyaknya jumlah penduduk dan konsumsi masyarakat Kabupaten Magelang berbanding lurus dengan jumlah produksi sampahnya. Dari tahun

ke tahun jumlah produksi sampah rata-rata per hari di Kabupaten Magelang semakin meningkat.



Sumber: DLHK Provinsi Jawa Tengah, 2019 (diolah)

**Gambar 1. 1**

Produksi Sampah dan Volume Sampah Terangkut Rata-Rata Per Hari Kabupaten Magelang Tahun 2012-2019 (dalam m<sup>3</sup>)

Dapat diketahui dari Gambar 1.1, dari tahun 2012 hingga tahun 2019 produksi sampah di Kabupaten Magelang terus mengalami peningkatan dan selalu lebih banyak dari volume sampah yang terangkut. Hal ini berarti di Kabupaten Magelang masih terdapat sampah yang belum terangkut dan dibawa ke tempat pembuangan akhir di (Tempat Pembuangan sampah Akhir (TPSA) Pasuruhan. Volume sampah terangkut di Kabupaten Magelang setiap tahunnya mengalami peningkatan, tetapi karena antara tahun 2015 hingga 2018 dibangun beberapa TPS 3R yang dapat mengolah berbagai jenis sampah maka volume atau timbunan sampah sedikit

berkurang. Adanya TPS 3R juga dapat membantu pemerintah dalam upaya pengelolaan sampah yang ada di Kabupaten Magelang.

Menurut Slamet & Soemirat (2004), pengelolaan sampah merupakan kebutuhan pelayanan yang sangat penting dan perlu disediakan oleh pemerintah. Volume sampah akan meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, peningkatan teknologi dan aktivitas sosial ekonomi masyarakat. Oleh karena itu selama pemerintah merencanakan kebijakan lingkungan, sangat penting untuk menyelidiki faktor-faktor sosial yang mungkin saja memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku lingkungan agar kebijakan lingkungan dapat diterima oleh masyarakat dan efektif. Menurut Alnaa et al. (2011) pemerintah penting untuk menyelidiki persepsi dan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah karena hal tersebut perlu adanya kesadaran dari masyarakat. Jika masyarakat lebih sadar dengan pengelolaan sampah maka timbulan sampah dapat berkurang. Persoalan mengenai sampah jika tidak diatasi dengan baik akan berdampak buruk pada berbagai aspek. Oleh karena itu untuk mengatasi persoalan sampah yang ada di Kabupaten Magelang, pemerintah Kabupaten Magelang telah merealisasikan TPS 3R yaitu sebuah metode penting dalam pengelolaan sampah dengan cara pengomposan dan daur ulang sampah sesuai dengan komponen dari masing-masing sampah (Kasih et al., 2018). Untuk mewujudkan konsep 3R salah satu cara penerapannya adalah melalui penyelenggaraan TPS 3R berbasis masyarakat yang diarahkan kepada konsep *Reduce* (mengurangi), *Reuse* (menggunakan kembali) dan *Recycle*

(daur ulang) (PLPBM, n.d.). Di Kabupaten Magelang terdapat 7 unit TPS 3R yang terdiri dari 1 unit melalui pendanaan APBN, 3 unit dari pendanaan APBD Provinsi, 1 unit dari pendanaan APBN Kabupaten Magelang dan 2 unit dibangun dengan pendanaan dari APBDes

**Tabel 1. 1**

Kapasitas Penanganan Sampah Melalui TPS3R

No	Nama TPS 3R	Tahun Pembangunan	Luas Bangunan TPS 3R (m <sup>2</sup> )	Jumlah Sampah Yang Masuk di TPS 3R (ton/hari)	Sumber Anggaran
1	TPS 3R Gunungpring1	2012	120	0,43	APBD Provinsi
2	TPS 3R Kaweron	2016	100	0,10	APBD Kabupaten
3	TPS 3R Gondosuli	2015	400	1,00	APBD Provinsi
4	TPS 3R Banyudono	2015	135	1,50	APBDes
5	TPS 3R Pagersari	2016	200	2,23	APBD Provinsi
6	TPS 3R Bima Sena, Sawangan	2017	124	0,68	APBDes
7	TPS 3R Gunungpring2	2018	200	0,20	APBN
Jumlah				6,14	

Sumber: Perbup Magelang No. 39 Tahun 2018

Dari Tabel 1.1, yang bersumber dari Peraturan Bupati Magelang Nomor 39 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, dapat dilihat bahwa TPS 3R Gondosuli merupakan TPS 3R yang memiliki bangunan paling luas diantara TPS 3R lainnya yang ada di Kabupaten Magelang. TPS 3R yang terletak di Desa Gondosuli RT 1/RW 4, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang ini dikelola oleh Kelompok Swadaya



Masyarakat (KSM) yang diketuai oleh Ibu Sri Wahyuni. Pelayanan dari TPS 3R ini telah menjangkau mayoritas Desa Gondosuli. Desa Gondosuli merupakan 1 dari 14 desa di Kecamatan Muntilan. Desa Gondosuli memiliki luas wilayah 3,23 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk sebanyak 4.113 jiwa yang terdiri dari 2.073 jiwa penduduk laki laki dan 2.040 jiwa penduduk perempuan dengan kepadatan penduduk sebesar 1.273,1 jiwa (BPS, 2020a). Hal tersebut yang kemudian membuat penulis ingin mengetahui dan meneliti bagaimana respon masyarakat sekitar TPS 3R Gondosuli dan mengetahui tingkat kesediaan untuk membayar (*willingness to pay*) guna pengelolaan sampah rumah tangga di TPS 3R Gondosuli dengan menggunakan pendekatan (CVM).

Dalam studi sebelumnya, Saptutyningsih (2007) melakukan penelitian dengan metode *Contingent Valuation Method* untuk menilai program perbaikan kualitas air sungai Code di Kota Yogyakarta. Hasilnya menunjukkan *willingness to pay* untuk perbaikan air sungai di Kota Yogyakarta yaitu adanya perbedaan pria dan wanita, pendapatan dan keberadaan anak dalam keluarga berpengaruh terhadap kemauan membayar. Sedangkan lama tinggal dan level kualitas air sungai berpengaruh negatif terhadap kemauan untuk membayar guna perbaikan kualitas air sungai Code di Kota Yogyakarta. *Contingent Valuation Method* Yakin (1997) adalah metode teknik survey untuk menanyakan kepada masyarakat tentang nilai atau harga yang mereka berikan terhadap komoditi yang tidak memiliki harga pasar seperti lingkungan. Menurut Garrod &

Willis (1999) *Contingent Valuation Method* (CVM) merupakan sebuah metode yang digunakan untuk menghitung jasa-jasa lingkungan. Kelebihan dari metode ini adalah teknik untuk mengestimasi manfaat yang diperoleh dan diterapkan langsung untuk menilai kebijakan apa yang akan diterapkan sehingga hasilnya dapat langsung dijadikan salah satu penilaian untuk dapat memberikan kebijakan apa yang dilakukan guna pengelolaan atau pelestarian lingkungan (Yakin, 1997). Selain itu, CVM juga merupakan merupakan satu-satunya metode yang dapat digunakan untuk mengukur nilai ekonomi bagi orang yang tidak mengalami secara langsung atas perubahan suatu kebijakan (Whitehead & Blomquist, 2006)

Dari penelitian yang dilakukan oleh Annisa et al. (2015) dengan variabel pendapatan, tingkat pendidikan dan jumlah anggota keluarga hasilnya menunjukkan bahwa variabel tingkat pendidikan dan jumlah anggota keluarga tidak signifikan terhadap kesediaan membayar untuk pengelolaan sampah. Sedangkan variabel pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesediaan membayar untuk pengelolaan sampah, semakin tinggi tingkat pendapatan masyarakat maka semakin tinggi pula kesediaan mereka membayar untuk pengelolaan sampah.

Dengan penelitian tentang *willingness to pay* pengelolaan sampah di kota Merkelle, Ethiopia, penulis menggunakan variabel pendapatan, usia, persepsi masyarakat tentang tanggung jawab pemerintah mengenai pengelolaan sampah, tingkat pendidikan, jumlah anggota keluarga, status perkawinan dan kepemilikan rumah, hasilnya didapatkan bahwa variabel

pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesediaan membayar untuk pengelolaan sampah, variabel usia dan persepsi masyarakat tentang tanggung jawab pemerintah mengenai pengelolaan sampah berpengaruh negatif terhadap kesediaan membayar. Sedangkan variabel tingkat pendidikan, status perkawinan dan kepemilikan rumah signifikan terhadap WTP pengelolaan sampah. Dalam penelitian ini, hanya variabel jumlah anggota keluarga yang tidak signifikan terhadap WTP pengelolaan sampah (Hagos et al., 2012)

Penelitian yang dilakukan Rahji & Oloruntoba (2009) dengan variabel usia, pendapatan, tingkat pendidikan, jenis kelamin dan jumlah anggota keluarga, hasilnya menunjukkan variabel pendapatan, tingkat pendidikan, dan jenis kelamin berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesediaan membayar guna pengelolaan sampah sedangkan variabel usia berpengaruh signifikan terhadap kesediaan membayar untuk pengelolaan sampah.

Menurut Ruban et al. (2014) tentang *Willingness to Pay* Masyarakat Terhadap Pengelolaan Sampah Ramah Lingkungan di TPA Dusun Toisapu Kota Ambon yang penelitiannya bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan, pekerjaan, pendapatan, jumlah tanggungan keluarga, lama tinggal dan jarak rumah dari TPA terhadap kesediaan membayar untuk pengelolaan sampah didapatkan hasil bahwa variabel pendapatan berpengaruh positif terhadap kesediaan membayar untuk pengelolaan sampah sedangkan variabel jarak rumah dari TPA berpengaruh negatif. Hal

ini berarti bahwa semakin jauh jarak rumah dari TPA, maka semakin kecil peluang responden bersedia membayar retribusi yang lebih tinggi untuk perbaikan pengelolaan sampah di TPA.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan 6 variabel, diantaranya: usia (Hagos et al., 2012; Yuan & Yabe, 2014; Rahji & Oloruntoba, 2009; Julius et al., 2017; Trang et al., 2017; Veronica et al., 2019; Edeme & Nkalu, 2018; Balasubramanian, 2019; Song et al., 2016; Alhakam & Iwan, 2019; Arnita, Yuly: Aidar, 2018 dan Alnaa et al., 2011), tingkat pendidikan (Annisa et al., 2015; Hagos et al., 2012; Yuan & Yabe, 2014; Rahji & Oloruntoba, 2009; Julius et al., 2017; Trang et al., 2017; Veronica et al., 2019; Edeme & Nkalu, 2018; Balasubramanian, 2019; Maskey & Singh, 2017; Song et al., 2016; Alhakam & Iwan, 2019 dan Arnita, Yuly: Aidar, 2018), jumlah anggota keluarga (Annisa et al., 2015; Hagos et al., 2012; Rahji & Oloruntoba, 2009; Trang et al., 2017; Veronica et al., 2019; Edeme & Nkalu, 2018; Balasubramanian, 2019; Maskey & Singh, 2017; Song et al., 2016 dan Alhakam & Iwan, 2019), pendapatan (Saptutyningsih, 2007; Annisa et al., 2015; Hagos et al., 2012; Rahji & Oloruntoba, 2009; Ruban et al., 2014; Julius et al., 2017; Veronica et al., 2019; Balasubramanian, 2019; Maskey & Singh, 2017; Song et al., 2016; Alhakam & Iwan, 2019; Arnita, Yuly Aidar, 2018 dan Alnaa et al., 2011), jarak tempat tinggal dengan TPA (Ruban et al., 2014) dan persepsi masyarakat tentang tanggung jawab pemerintah mengenai pengelolaan sampah (Hagos et al., 2012)

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan tema “**Determinan *Willingness to Pay* Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di TPS 3R Gondosuli Kabupaten Magelang**”

## **B. Batasan Masalah**

Penulis memiliki keterbatasan atas penelitian sehingga tidak semua TPS 3R yang ada di Kabupaten Magelang dibahas dalam penelitian ini. Sesuai dengan latar belakang yang disampaikan penulis, maka dengan ini penulis hanya ingin meneliti TPS 3R Gondosuli menampung sampah rumah tangga Desa Gondosuli Kabupaten Magelang

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah perlunya diketahui respon dari masyarakat dengan adanya TPS 3R di Desa Gondosuli. Berdasarkan uraian di atas, maka masalah yang muncul dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Berapa nilai rata-rata *willingness to pay* masyarakat Desa Gondosuli Kabupaten Magelang untuk pengelolaan sampah rumah tangga di TPS 3R Gondosuli?
2. Bagaimana pengaruh usia masyarakat Desa Gondosuli Kabupaten Magelang terhadap *willingness to pay* untuk pengelolaan sampah rumah tangga di TPS 3R Gondosuli?
3. Bagaimana pengaruh tingkat pendidikan terhadap *willingness to pay* untuk pengelolaan sampah rumah tangga di TPS 3R Gondosuli?

4. Bagaimana pengaruh jumlah anggota keluarga terhadap *willingness to pay* untuk pengelolaan sampah rumah tangga di TPS 3R Gondosuli?
5. Bagaimana pengaruh Pendapatan rumah tangga Desa Gondosuli Kabupaten Magelang terhadap *willingness to pay* untuk pengelolaan sampah rumah tangga di TPS 3R Gondosuli?
6. Bagaimana pengaruh Jarak tempat tinggal dengan tempat pembuangan akhir (TPA) masyarakat Desa Gondosuli Kabupaten Magelang terhadap *willingness to pay* untuk pengelolaan sampah rumah tangga di TPS 3R Gondosuli?
7. Bagaimana pengaruh persepsi masyarakat tentang tanggung jawab pemerintah mengenai pengelolaan sampah terhadap *willingness to pay* untuk pengelolaan sampah rumah tangga di TPS 3R Gondosuli?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui besarnya nilai rata-rata *willingness to pay* masyarakat Desa Gondosuli Kabupaten Magelang untuk pengelolaan sampah rumah tangga di TPS 3R Gondosuli.
2. Untuk mengetahui pengaruh usia masyarakat Desa Gondosuli Kabupaten Magelang terhadap *willingness to pay* untuk pengelolaan sampah rumah tangga di TPS 3R Gondosuli.

3. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan masyarakat Desa Gondosuli Kabupaten Magelang terhadap *willingness to pay* untuk pengelolaan sampah rumah tangga di TPS 3R Gondosuli.
4. Untuk mengetahui pengaruh jumlah anggota keluarga masyarakat Desa Gondosuli Kabupaten Magelang terhadap *willingness to pay* untuk pengelolaan sampah rumah tangga di TPS 3R Gondosuli.
5. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan rumah tangga Desa Gondosuli Kabupaten Magelang terhadap *willingness to pay* untuk pengelolaan sampah rumah tangga di TPS 3R Gondosuli.
6. Untuk mengetahui pengaruh jarak tempat tinggal dengan tempat pembuangan akhir (TPA) masyarakat Desa Gondosuli Kabupaten Magelang terhadap *willingness to pay* untuk pengelolaan sampah rumah tangga di TPS 3R Gondosuli.
7. Untuk mengetahui pengaruh persepsi masyarakat tentang tanggung jawab pemerintah mengenai pengelolaan sampah Desa Gondosuli Kabupaten Magelang terhadap *willingness to pay* untuk pengelolaan sampah rumah tangga di TPS 3R Gondosuli.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi penulis

Penelitian ini merupakan salah satu cara penulis untuk mengimplementasikan ilmu yang sudah didapat berupa teori-teori yang sudah dipelajari dan ada beberapa teori baru yang bisa diketahui. Selain

itu, penelitian ini juga digunakan sebagai pembandingan teori yang sudah ada dengan kenyataan yang sebenarnya terjadi di lapangan.

2. Bagi pembaca

Penelitian ini diharapkan menjadi referensi dan bacaan untuk pembaca atau peneliti berikutnya dalam menulis penelitian dengan tema atau topik yang sama.

3. Bagi pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan untuk pemerintah, khususnya pemerintah Kabupaten Magelang agar lebih memperhatikan hal-hal kecil seperti sampah untuk membuat Kabupaten Magelang menjadi lebih baik lagi dalam pengendalian dan pengelolaan sampahnya. Tak hanya pemerintah daerah Kabupaten Magelang, tetapi juga untuk pemerintah pusat agar dapat memperhatikan pengendalian sampah di daerah padat penduduk lainnya seperti Semarang, Surabaya dan Jakarta.